BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2018
KOTA BENGKULU
RABU, 12 SEPTEMBER 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [ ] NETRAL [X] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Dari Rp 80 M Utang, Dibayar Rp 27 M

RBI, BENGKULU - Ini data pembahasan KUA APBD Perubahan tahun 2018 yang masih berlanjut saat ini. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu akan menganggarkan dana Rp 27 Miliar untuk bayar utang. "Jadi begini. Utang yang diajukan itu sampai Rp 80 M data yang kita terima, tapi yang sudah ada audit dari BPK itu lebih kurang Rp 27 M. Itu tentukan akan kita bayar bertahap, sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah juga, sementara untuk tahap awal ini yang sudah diaudit BPK itu yang kita akomodir terlebih dahulu," ungkap anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu H. Parial SH, MH, kemarin (11/9). Dijelaskan oleh Parial, dari hasil audit BPK itu yang saat ini masih mereka diskusikan,

BACA HALAMAN 11...

SAMBUNGAN HAL 1...

nanti pihaknya juga akan melihat seperti apa mekanisme pola pembayarannya. "Sedangkan untuk pembayaran utang lainnya, kami masih menunggu, kita masih menunggu lampirannya seperti apa? Data-datanya bagaimana? Untuk membayar itu harus ada bukti-bukti pendukung. Apakah semuanya harus ada audit BPKP atau bagaimana," jelasnya.

Adapun bagi utang yang tidak ada audit BPKP nya maka pihaknya belum bisa memastikan apakah utang tersebut bisa dibayarkan atau tidak. "Kita lihat dulu syaratnya, kalau harus diaudit ya tunggu hasil audit.

Dan untuk membayar utang tersebut memang tidak akan terakomodir seluruhnya di APBD Perubahan tahun ini, sebab itu nanti kita diskusikan kembali dalam pembahasan APBD Tahun 2019. Yang penting persyaratan untuk pembayaran utang itu harus terpenuhi terlebih dahulu, agar kita tidak salah dalam pelaksanaannya," tegas Ketua Fraksi PAN tersebut.

Namun dalam dianggarkannya dana Rp 27 M nanti, dimana saat ini masih pembahasan KUA APBD Perubahan, Menurut Parial itu sebenarnya bukan utang, "Sesungguhnya itu bukan utang, tapi itu kegiatan, mereka menyelesaikan kegiatan tapi pekerjaannya diakhir tahun anggaran, karena mengikuti penambahan 51 hari. Itu sebenarnya bukan utang, kegiatan itu sendiri memang harus diselesaikan," pungkasnya. (idn)